

## Kawasan Parkir Pro Kaum Miskin

Malioboro tidak saja menjadi *land mark* Kota Yogyakarta, lebih dari itu Malioboro merupakan kawasan dengan nilai ekonomis yang menghidupi banyak manusia. Termasuk di dalamnya juru parkir yang selama ini hidup dari kawasan Parkir Malioboro. Tercatat 150 Jukir menggantungkan hidupnya di kawasan ini, dengan penghasilan rata-rata Rp. 25.000,00 perhari serta tanggungan keluarga 3 orang dapat disimpulkan parkir Kawasan Malioboro merupakan salah satu lokasi bagi keluarga miskin untuk menyambung hidupnya.

Atas dasar asumsi tersebut, penataan kawasan parkir Kawasan Malioboro yang sudah menjadi isu sejak 3 tahun silam patut untuk dijadikan perhatian bersama. Dengan metode penelitian yang memadukan kualitatif dan kuantitatif Kelompok Peduli Juru Parkir (Pokduljukir) melakukan penelitian guna menggali aspirasi dari juru parkir sebagai landasan Pemerintah Kota Jogjakarta untuk melakukan penataan secara lebih manusiawi. Adapun pengambilan data dilakukan pada 3 Juli 2009 melalui teknik *snow ball*.

Hasil penelitian memperlihatkan, adanya pemaknaan terhadap konsep “penataan” sebagai “relokasi” kawasan parkir dari juru parkir dengan beragam tanggapan terhadap rencana tersebut ; 33 % menolak atas rencana tersebut, 17 % menerima, 33 % ‘nrimo’, dan 17 % menyerukan untuk mempertimbangkan untung rugi sebelum mengambil kebijakan apakah menerima atau menolaknya.

Harapan dari juru parkir seandainya rencana tersebut akan diimplementasikan Pemerintah Kota Jogjakarta adalah adanya ruang bagi juru parkir untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan kawasan parkir baik secara personal dengan juru parkir maupun secara kelembagaan dengan paguyuban.

Mengingat inilah substansi dari pembangunan yang semestinya menempatkan juru parkir tidak saja sebagai objek namun juga subjek yang turut menentukan. Pada tahap berikutnya, lokasi relokasi yang memiliki nilai ekonomis sama dengan kawasan Malioboro, sosialisasi lebih dini adalah harapan yang dikemukakan untuk dijadikan pijakan kebijakan.

Atas hasil penelitian tersebut ada sejumlah hal yang mutlak dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait rencana penataan kawasan parkir Malioboro :

1. Memperjelas konteks “penataan” dalam bahasa yang lebih ‘bersih’ untuk menghindari tafsir “relokasi” sehingga mengurangi resistensi dari Juru Parkir.
2. Sosialisasi alasan penataan kawasan parkir secara masif.
3. Jika relokasi menjadi jalan keluar atas penataan kawasan Parkir, mutlak adanya keterlibatan Juru Parkir maupun paguyuban dalam proses perencanaan-pelaksanaan.
4. Variasi Pendekatan kepada Juru Parkir sesuai dengan sikap yang muncul terhadap rencana Relokasi.
5. Mencari lokasi Relokasi kawasan Parkir dengan nilai ekonomis sebanding.
6. Komunikasi lebih intensif dengan paguyuban Juru Parkir .

Kebijakan publik yang pro kaum miskin inilah yang semestinya dikedepankan Pemerintah Kota Jogjakarta pada satu sisi, disamping pada sisi lain upaya penataan kawasan Malioboro menuju wilayah yang kompatibel dengan slogan *Jogja Never Ending Asia*.

**Yogyakarta, 3 Juli 2009**